



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi dokumen Renja PD Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2026.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan *stakeholders* lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Renja ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, Agustus 2025

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

**AYU MITRIA FADRI, S.Si.,M.MPd
NIP. 19720923 200212 2 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	i.1
1.1. Latar Belakang	i.1
1.2. Landasan Hukum	i.7
1.3. Maksud dan Tujuan	i.8
1.4. Sistematika Penulisan	i.8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.....	1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.....	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.....	40
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025.....	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V PENUTUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 definisi umum Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD. Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat : a. data perencanaan pembangunan daerah; b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan c. informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap terakhir pada RPJPD 2005-2025 sekaligus tahap pertama dalam ruang lingkup RPJPD 2025-2045. Periode RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini merupakan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029. Disamping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJM Nasional.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dimulai dari rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Oleh karena itu, menindaklanjuti amanat pasal 138-143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dan menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2026.

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah berisi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan penyusunan Renja sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPd. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Selanjutnya

Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Selanjutnya dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan APBD.

Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 dan Renstra tahun 2025-2029 dengan memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta K/L. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Adapun jadwal penyusunan renja disajikan pada tabel 1.1 berikut ini:

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang mendukung Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 Tahun 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 116);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menjabarkan program dan kegiatan serta subkegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta subkegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta subkegiatan pada tahun 2026;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta subkegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi penjelasan tentang hal-hal berikut :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu

- Bab penjelasan tentang hal-hal berikut :
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Bab penjelasan tentang hal-hal berikut :
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 3.3 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Bab ini penjelasan tentang Rencana kerja tahun 2026 dan rencana pendanaannya.
- Bab V. Penutup
- Berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan untuk tahun 2026 dan perkiraan capaian tahun 2025 dengan berpedoman kepada APBD tahun 2025. Bab ini juga menjelaskan evaluasi Renstra 2021-2026 berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2026 dan Renstra disesuaikan dengan laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD. Adapun pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut ini.

Tabel 2.1
(Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NAMA OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Akhir Periode Renstra 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2	7									
2	7	3								
2	7	3	2,01							
2	7	4								
2	7	4	2,01							
2	7	4	2,05							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Akhir Periode Renstra 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025			
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2026 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)		
2	7	5	Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	60 perkara	-	10 perkara	2 perkara	20%	10 perkara	3 perkara	-
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah								
3	31	1	2,01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	
3	31	1	2,02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	
3	31	1	2,05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-
3	31	1	2,07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 paket	NA	2 paket	4 paket	-	-	
3	31	1	2,08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 unit roda 2, 12 roda 4	NA	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	100%	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	
3	31	1	2,09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	12 unit	NA	2 unit	2 unit	100%	2 unit	
3	31	2		Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Akhir Periode Renstra 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025				
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2026 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
3	31	2	2,01	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	-	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
3	31	3		Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)								
3	31	3	2,01	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	850 unit izin	NA	100 unit izin	192 unit izin	192%	100 unit izin		
3	31	4		Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten								
3	31	4	2,01	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3	32	4		Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	32	4	2,01	Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100%	NA	-	3 Pelatihan, 44KK	-	20 KK	-	-

Sesuai Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Industri

Terdapat 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 20 (dua puluh) Sub kegiatan pada urusan Industri. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut merupakan pendukung indikator kinerja tercapainya persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas selain itu merupakan program/kegiatan pendukung program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada tahun 2025, program, kegiatan dan subkegiatan belum terealisasi 100% sebab masih dalam tahun berjalan. Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas adalah 100%. Namun secara pencapaian realisasi keuangan pada tahun 2022 ini juga terjadi keterlambatan pembayaran terhadap beberapa pekerjaan akibat tidak tersedianya dana pada kas daerah, sehingga pembayaran pekerjaan tersebut dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2023. Ditahun 2024 realisasi tiap kegiatan mencapai 99,83% dengan realisasi keuangan sebesar 97,21%, sedangkan ditahun 2025 capaian realisasi kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga sampai Triwulan 2 sudah mencapai 27,63% dan realisasi keuangan 29,32%.

Walaupun Indikator kinerja telah tercapai masih terdapat pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan produk IKM yang berkualitas. Selain itu, dalam membina IKM untuk pencapaian peningkatan produk IKM yang berkualitas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan UKM, DPMPSTP, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Selama ini dalam rangka pembinaan IKM masih kurang dilakukan koordinasi yang intensif sehingga sering terjadi overlap pembinaan terhadap satu IKM oleh beberapa instansi, padahal banyak IKM-IKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung dalam pencapaian peningkatan produk IKM yang berkualitas.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas, diuraikan sebagai berikut :

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Subkegiatan

Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, dengan outputnya adalah tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri. Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah bantuan peralatan yang diberikan kepada pelaku IKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk indikator keluaran di tahun 2025 belum terealisasi seluruhnya sebab masih dalam tahun berjalan. Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi halal dan merek, pelatihan GMP dan pelatihan manajemen usaha untuk pelaku IKM. Subkegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKM. Indikator terealisasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 masih belum dapat diketahui mengingat masih dalam tahun berjalan. Pada tahun 2025 subkegiatan yang dilakukan hanya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri.

- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota. Subkegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, indikator keluaran subkegiatan ini adalah jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha industri. Pada tahun 2022 terdapat izin industri yang difasilitasi penerbitannya yaitu sebanyak 436 unit dalam bentuk NIB. Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota, indikator keluaran subkegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 dan 2024 subkegiatan ini mengeluarkan fasilitas izin industri sebanyak 192 unit. subkegiatan

koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2024 telah terealisasi 100%, namun ditahun 2025 realisasi subkegiatan ini masih belum dapat dihitung karena masih dalam tahun berjalan.

- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota. Subkegiatan diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS, indikator keluaran subkegiatan adalah terfasilitasi kegiatan Dekranasda (pameran, Musda Dekranasda, Gebyar IKM, Festival industrial kreatif), terlaksananya sosialisasi akses permodalan bagi sejumlah IKM unggulan, dan terlaksananya bimtek promosi dan pemasaran. Pada tahun 2024 subkegiatan diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS 2024 telah terealisasi 99,85% dimana kegiatan yang dilakukan yaitu mengikuti Pekan Budaya Lima Puluh Kota ,Pameran Internasional Handicraft Trade Fair (INACRAFT), Pembelian tenda pameran dan pencetakan buku tentang Tenun Kubang dan Songket Halaban di tahun 2025 masih belum ada IKM yang dibawa untuk mengikuti kegiatan pameran baik ditingkat provinsi maupun Nasional karena adanya Efisiensi Anggaran usai terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025.

2. Urusan Tenaga Kerja

Terdapat 2 (dua) program (dua) 2 kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan pada urusan Tenaga Kerja ditahun 2025. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut bertujuan mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, selain itu merupakan program/kegiatan pendukung program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2024, seluruh pencapaian indikator program, kegiatan dan subkegiatan terealisasi 100%. Namun ditahun 2025 capaian indikator program masih belum bisa diketahui sebab masih dalam tahun berjalan.

Masih banyak pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mengembangkan sektor ketenaga kerjaan baik dari segi penyiapan pencari kerja/tenaga kerja terampil/berkompetensi, produktivitas tenaga kerja, peningkatan pelayanan antar kerja dan penempatan tenaga

kerja, serta peningkatan perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas, diuraikan sebagai berikut :

- Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Subkegiatan proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, ditahun 2024 telah dijalankan sejumlah pelatihan diantaranya yaitu pelatihan Teknisi Sepeda Motor, Pelatihan Menjahit dan Pelatihan Barber Shop, pelatihan ini dilaksanakan di BLK dengan total peserta sebanyak 48 orang dan Indikator terealisasi 100% dan di tahun 2025 akan dijalankan 18 paket pelatihan untuk pencari kerja dengan menggandeng sejumlah Balai Latihan Kerja yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
- Program Penempatan tenaga kerja, kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota. Indikator Subkegiatan Perluasan kesempatan kerja, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pelayanan antar kerja yaitu pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK1), rekomendasi paspor CPMI, dan penerbitan tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK). Pada tahun 2024 penerbitan AK1 berjumlah 765 unit, rekomendasi paspor CPMI sebanyak 21 orang. Program ini ditahun 2024 juga memberikan pelatihan kewirausahaan kepada 32 orang masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdata pada data P3KE. Di tahun 2025 kegiatan pada program ini hanya terfokus pada pelaksanaan penerbitan AK1, Pemeberian rekomendasi paspor kepada CPMI dan menerima retribusi RPTKA.
- Program Hubungan industrial, kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. Subkegiatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator keluaran subkegiatan adalah terselesaikannya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Pada tahun 2024 walaupun Program kegiatan ini tidak masuk kedalam DPA namun Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja telah menyelesaikan mediasi perselisihan hubungan industrial

sebanyak 2 (dua) kasus, 0 (nol) kasus mogok kerja dan 0 (nol) kasus penutupan perusahaan. Sedangkan ditahun 2025 Program kegiatan ini masih tidak masuk kedalam DPA.

3. Urusan Transmigrasi

Terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan yang mendukung indikator kinerja meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi.

➤ Program Pengembangan kawasan transmigrasi, kegiatan pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian. Subkegiatan penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, indikator keluaran subkegiatan adalah jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi. Pada tahun 2024 subkegiatan penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman terealisasi sebesar 100% dimana kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan peninjauan perkembangan masyarakat ex-transmigrasi usai diberikan pelatihan pada tahun sebelumnya. Untuk 2025 Program kegiatan ini masih belum dihitung mengingat masih dalam tahun berjalan.

4. Urusan Penunjang

Program penunjang urusan pemerintah daerah pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar . Untuk tahun 2025 realisasi kegiatan masih belum dihitung sebab masih dalam tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pelayanan urusan industri, ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dasar hukum pelaksanaan pelayanan antara lain : Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri, Permenakertrans nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, dan Permenaker nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja.

Selanjutnya, pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan Industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Untuk mewujudkan pembangunan Industri yang maju adalah melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Perindustrian sebagai tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan nasional; demokrasi ekonomi; kepastian berusaha; pemerataan persebaran; persaingan usaha yang sehat; dan keterkaitan Industri. Adapun tujuan penyelenggaraan perindustrian adalah mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Agar tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana dimaksud dapat tercapai sesuai yang diharapkan, tentu harus didukung dengan pembangunan sumber daya Industri yang meliputi pembangunan sumber daya manusia; pemanfaatan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan penyediaan sumber pembiayaan.

Sektor industri di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup berkembang, terutama industri kecil menengah (IKM). IKM tersebar di kawasan pemukiman penduduk, seperti industri kecil pengolahan makanan, industri kerajinan dan sandang, serta aneka industri lainnya. Pertumbuhan industri pada tahun 2024 adalah sebanyak 100 IKM atau sampai tahun 2024 IKM yang terdata berjumlah 9701 unit. Dari 100 IKM yang tumbuh tersebut sebagian besar IKM adalah IKM pengolahan makanan ringan, seperti : keripik ubi, kue kering, rendang dan sebagian kecilnya adalah industri kerajinan dan bordir. Hal ini menunjukkan bahwa

IKM-IKM tersebut yang dominan dalam penumbuhan usaha baru, karena lebih mudah dalam memperoleh nilai ekonominya. Untuk tahun 2025 jumlah pertumbuhan IKM masih dalam tahap perhitungan mengingat masih dalam tahun berjalan.

Di sektor industri berdasarkan data pengurusan perizinan IUI dari tahun ke tahun, mengalami kenaikan walaupun tidak besar. Namun apabila dilihat kenyataannya di lapangan masih banyak IKM yang belum memiliki perizinan karena masih menganggap bahwa perizinan tidak begitu penting bagi perkembangan usahanya. Padahal sebaliknya, perizinan sangat dibutuhkan bagi pengembangan IKM, contohnya untuk bantuan permodalan (melalui perbankan/BUMN) dipersyaratkan IKM yang telah memiliki izin. Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap IKM baru dalam mengurus perizinan, dinas akan lebih mengintensifkan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap IKM baru tersebut.

Selain itu, pada sektor ketenagakerjaan untuk pelayanan pendaftaran pencari kerja selama tahun 2024 terdapat 765 pencari kerja yang diterbitkan AK1. Dari data penempatan tenaga kerja yang terdaftar tahun 2024, hanya sebesar 37 orang pencari kerja yang ditempatkan baik penempatan di dalam negeri maupun penempatan ke luar negeri. Penempatan tenaga kerja relative kecil, hal ini sesuai dengan penjelasan diatas. Pelayanan lainnya di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian informasi bursa kerja *online*, pengawasan dan perlindungan perusahaan dan tenaga kerja. Pada tahun 2025 untuk pelayanan pendaftaran pencari kerja sampai bulan Juli 2025 sudah terdapat 559 orang pencari kerja yang mendapatkan kartu AK1

Tabel 2.2
(Tabel T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKU Kepala Daerah	IKU Kepala OPD	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
						Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	-				0,0807	0,0887	0,0986	-	0,0047	-	-	-	-
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-				10	10	10	-	3	3	-	-	-
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-				10	10	10	-	2	2	-	-	-
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-				550	600	650	-	37	-	-	-	-
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	-				7000	7250	7500	-	13.482	-	-	-	-
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-				180	180	180	-	48	-	-	-	-
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-				70	70	70	-	-	-	-	-	-
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-				90	90	90	-	32	-	-	-	-
9	Angka partisipasi angkatan kerja	-				55,75	56,24	56,73	-	57,28	-	-	-	-
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	-				73,13	73,23	73,33	-	74,17	-	-	-	-
11	Tingkat pengangguran terbuka	-				2,44	2,27	2,07	-	3,68	-	-	-	-
12	Rasio penduduk yang bekerja	-				98,90	98,93	98,95	-	96,32	-	-	-	-
13	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	-				76,4	77,4	78,4	-	74,17	-	-	-	-
14	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	-				79,13	79,23	79,33	-	79,43	-	-	-	-

No	Indikator	SPM/ standa r nasional	IKU Kepala Daerah	IKU Kepala OPD	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
						Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Proporsi Pengangguran Terbuka	-	V	V		-	-	3,55%	3,47%	-	-	3,55%	3,47%	Indikator Baru Renstra 2025-2029
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-	-	V	-	-	29,27%	32,55%	-	-	29,27%	32,55%	Indikator Baru Renstra 2025-2029
17	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	V	V	-	-	Rp.64.374.937	Rp.65.877.881	-	-	Rp.64.374.937	Rp.65.877.881	Indikator Baru Renstra 2025-2029
18	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi	-	-	-	V	-	-	67,29%	68,97%	-	-	67,29%	68,97%	Indikator Baru Renstra 2025-2029
19	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	V	-	-	71.224.927	72.443.380	-	-	71.224.927	72.443.380	Indikator Baru Renstra 2025-2029
20	Rasio PDRB Industri Pengolahan	-	V	V	V	-	-	7,39%	7,77%	-	-	7,39%	7,77%	Indikator Baru Renstra 2025-2029
21	Rasio Kewirausahaan	-	V	V	V	-	-	6,92%	6,92%	-	-	6,92%	6,92%	Indikator Baru Renstra 2025-2029

22	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	-	V	V	V	-	-	42,90%	44,81%	-	-	42,90%	44,81%	Indikator Baru Renstra 2025-2029-
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	V	V	V	-	-	63,23%	63,57%	-	-	63,23%	63,57%	Indikator Baru Renstra 2025-2029-
24	Proporsi Jumlah IKM	-	V	V	V	-	-	3,59%	3,67%	-	-	3,59%	3,67%	Indikator Baru Renstra 2025-2029-
25	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRE	-	-	V		-	-	7,39%	7,77%	-	-	7,39%	7,77%	Indikator Baru Renstra 2025-2029-
26	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	-	-	V		-	-	8,0%	8,5%			8,0%	8,5%	Indikator Baru Renstra 2025-2029

Dalam urusan industri indikator kinerja daerah yang ditetapkan adalah cakupan bina kelompok pengrajin dimana target dari tahun 2021-2026 yaitu 7,31%, 8,07%, 8,87% dan 9,86%. Dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,47% dan tahun 2025 jumlah realisasi cakupan bina kelompok pengrajin belum dapat dihitung karena tahun masih berjalan. Sementara proyeksi dari tahun 2025 yakni sebesar 8,87%. Terdapat 13 indikator kinerja daerah yang ditetapkan pada urusan tenaga kerja baik dari angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) diharapkan tidak meningkat pada tahun 2021-2026, pada tahun 2024 masuk 3 laporan sengketa pengusaha-pekerja sedangkan ditahun sebelumnya yakni ditahun 2023 terjadi 2 kasus sengketa. Pada 2025 hingga bulan Juli sudah masuk 2 laporan sengketa perselisihan antara pengusaha-pekerja dan sudah terselesaikan dengan perjanjian bermasa. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek diharapkan dapat meningkat pada tahun 2021-2026, pada tahun 2024 jumlah pekerja yang terdaftar yang ditempatkan sudah tercatat sebanyak 37 orang, namun 2025 jumlah pencari kerja yang ditempatkan masih dalam proses pendataan mengingat saat ini masih dalam tahun berjalan. Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbais kompetensi, dan tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat diharapkan dapat dilakukan setiap tahunnya dari tahun 2021-2026, pada tahun anggaran 2024 sudah dilatihnya sebanyak 48 orang masyarakat dengan pelatihan berbasis kompetensi, dengan 3 jenis pelatihan diantaranya pelatihan menjahit, palatihan teknisi sepeda motor dan pelatihan barber shop. Sedangkan untuk tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan ditahun 2024 berjumlah 32 orang. Untuk tahun 2025 jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan masih belum dapat dihitung karena masih dalam tahun berjalan. Realisasi angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan, didapatkan realisasi sebesar 55,85% dan 74,54 % dengan target sebesar 55,27% dan 73,02%. Sedangkan pada tahun 2024 angka partisipasi angkatan kerja berjumlah 57,28% dimana angka ini melebihi target tahun 2024 yakni 55,75%. Ditahun 2025 Realisasi angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja masih belum dapat dihitung karena masih dalam tahun berjalan. Sementara Tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat menurun dari tahun 2021-2026, namun realisasi pengangguran terbuka masih belum memenuhi target, tercatat pada tahun 2023 realisasi angka pengangguran terbuka yakni sebesar 3,72 % sedangkan target di tahun 2023 yakni 2,57 dan pada tahun 2024 jumlah angka pengangguran terbuka masih meningkat dimana tahun 2024

tercatat sebanyak 3,68% sedangkan target di tahun 2024 yakni 2,44, dan ditahun 2025 angka pengangguran terbuka masih belum bisa diketahui mengingat masih dalam tahun berjalan. Rasio penduduk yang bekerja, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya, namun pada realisasinya di tahun 2023 rasio penduduk yang bekerja masih belum memenuhi target dimana realisasi sebesar 96,28% dan 2024 masih terhitung sebanyak 96,32. Pada tahun 2025 rasio penduduk yang bekerja masih belum bisa diketahui mengingat masih dalam tahun berjalan.

Untuk indikator kinerja persentase peningkatan penempatan tenaga kerja, target untuk lima tahun adalah 3.100 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Target tahun 2024 adalah sebesar 68,09%, namun tenaga kerja yang sudah ditempatkan sepanjang tahun 2024 masih sangat kecil yaitu sebanyak 37 orang atau sebesar 4,83%. Salah satu penyebabnya adalah banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja. Program kegiatan untuk penempatan tenaga kerja tidak terlaksana, selain itu faktor dari luar yang sangat dominan adalah banyak perusahaan yang tidak menerima lowongan bahkan banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya. Baik itu lowongan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri adalah salah satu upaya pencapaian target kinerja pelayanan. Selain melalui penempatan diatas, tenaga kerja yang bekerja secara mandiri sudah tercatat sebanyak 32 wirausaha yang tumbuh, karena minat pencari kerja untuk berwirausaha cukup baik. Pada tahun 2024 pencapaian indikator persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%) belum dapat diketahui sebab masih menunggu perelisan KDA 2025 oleh BPS. Untuk indikator persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%) terealisasi pada tahun 2024 berjumlah 5,63% namun pada tahun 2023 terdapat 95 IKM dari yang mengalami peningkatan produk berkualitas, diharapkan jumlah IKM yang mengalami peningkatan produk yang berkualitas ini dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bapelitbang terhadap stakeholdersnya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2025 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Aplikasi SIPD.
Penerapan aplikasi SIPD untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas, transparan dan tepat waktu dapat terlaksana.
2. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD seperti melalui Whatsapp group.
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi lingkup masing-masing bidang
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian pembangunan. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat turut ditingkatkan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 :
Pemetaan Permasalahan pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan IKM	1. Belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan IKM	1. Masih kurangnya jumlah IKM yang dilatih 2. Masih kurangnya jenis pelatihan teknis dan non teknis IKM 3. Masih kurangnya produk IKM yang memiliki merek dan label halal

		2. Masih kurangnya sarana dan prasarana IKM	1. Masih kurangnya bantuan peralatan produksi IKM 2. Masih kurangnya jumlah fasilitasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas 3. Masih kurangnya keikutsertaan IKM dalam promosi/pameran 4. Kurangnya jumlah IKM yang mendapat fasilitasi akses permodalan
2.	Belum Optimalnya penempatan tenaga kerja	1. Masih kurangnya kualitas tenaga kerja 2. Masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja	1. Belum adanya RTKD 2. Belum optimalnya jumlah pencari kerja terlatih yang berkompotensi 1. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja 2. Belum optimalnya pelaksanaan job fair/bursa kerja 3. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja
3.	Belum optimalnya pengembangan transmigrasi	1. Masih kurangnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi	1. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja Belum optimalnya identifikasi potensi Kawasan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan IKM, masih kurangnya sarana dan prasarana IKM, masih kurangnya kualitas tenaga kerja, masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja dan masih kurangnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi.

Tantangan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM, meningkatnya produk yang masuk ke wilayah Lima Puluh Kota dengan kualitas dan harga kompetitif di banding produk lokal, pengembangan hilirisasi produk lokal masih kurang/rendah, sikap mandiri dan kesungguhan masyarakat dalam berusaha/berbisnis masih kurang/rendah. Tantangan dari sektor tenaga kerja yaitu SDM Angkatan kerja belum optimal dalam penempatan sesuai dengan latar belakang ilmu dan keterampilan yang dimiliki, persaingan yang ketat pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Tantangan dari sektor transmigrasi yaitu kurangnya sarana dan fasilitas penunjang di daerah baru, seperti jalan/akses ke lokasi transmigrasi dari ibukota kabupaten/kecamatan tidak memadai, kendaraan sulit menempuh jalannya.

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi atau kemampuan. Peluang yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari sektor industri, sektor tenaga kerja dan dari sektor transmigrasi.

1. Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2021-2023, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami

penurunan dari periode sebelumnya. sebagaimana terlihat pada dibawah ini. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2021 sebesar 6,49 %, namun terjadi peningkatan ditahun 2023 menjadi 6,51 %. Penurunan dari periode sebelumnya ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri, bahkan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia juga ikut menyebabkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah.

Oleh sebab itu, diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, Mengadakan kegiatan temu bisnis dan peningkatan akses permodalan dengan mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

2. Dari sektor tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tren yang menurun sampai tahun 2021 dan naik lagi di tahun 2023, namun data angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota di tahun 2024 mengalami kenaikan dimana angka pengangguran terbuka berjumlah 3,68%. Tercatat TPT Kabupaten Lima Puluh Kota ditahun 2021 TPT terbilang kecil yakni 2,25% dan terjadi peningkatan ditahun 2022 menjadi 3,72%. Ditahun 2023 terjadi penurunan TPT sebesar 2,57%. Dan kembali mengalami lonjakan ditahun 2024 menjadi 3,68%. Kenaikan TPT pada tahun 2022-2024 ini lebih disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid 19 yang telah melanda Dunia dari awal tahun 2020 serta kurangnya lowongan pekerjaan di Kabupeten Lima Puluh Kota. Namun jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah provinsi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan

tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK.

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%) dari tahun 2021-2023 selalu tumbuh walaupun terjadi penurunan di tahun 2022 dan meningkat lagi di tahun 2023.

Urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Beberapa informasi terkait dengan ketenagakerjaan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2023 disajikan antara lain angka sangketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian Bersama, keselamatan dan perlindungan, kepersertaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan.

3. Dari sektor transmigrasi yaitu telah tersedianya kawasan/lokasi transmigrasi di Nagari Galugur, Nagari Muaro Peti, Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dan Nagari Tanjung Baliak Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil telaahan Kementerian/Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami trend peningkatan namun peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak berpengaruh signifikan, dan pada tahun 2023 tercatat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,55% meningkat sebanyak 0,53% dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021-2023 Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri

pengolahan sebagai potensi yang dimiliki. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan dan sektor industri pengolahan mengalami penurunan rata-rata. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dikarenakan masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil, pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi
- Terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha
- Masih rendahnya penumbuhan kewirausahaan.

b. Pengangguran

Pengangguran memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional;
- Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas;
- Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

c. Belum terwujudnya daya saing produk industri

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Malahan untuk produk dalam negeri, produk kita masih rendah daya saing. Hal tersebut

dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan anyaman mansiang, tas, sulaman, tenun dan bordir serta aneka industri lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

- d. Dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan
Masih banyaknya usaha-usaha ekonomi baik dari sektor industri maupun perdagangan yang bersifat padat karya yang membutuhkan banyak orang dalam proses produksinya sehingga untuk produk-produk tertentu mengurangi daya saing produk yang dihasilkan. Disisi lain dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu perlu adanya ide yang brilian untuk menjadikan dominasi ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya dengan meningkatkan kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif sehingga kita dapat bertahan dengan ekonomi kerakyatan ini.
- e. Lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang terbatas, akses informasi lapangan kerja sulit, serta rendahnya kualitas angkatan kerja/rendahnya keterampilan/skill tenaga kerja. Faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan yaitu kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi globalisasi, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.
- f. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi kedua yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah yang berperan dalam urusan industri, tenaga kerja dan transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga

diperlukan kerjasama semua unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil alasan kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.5 (Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut.

Tabel 2.4
(Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-	4.731.144.557	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-	4.731.144.557	
I.1	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	13.000.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	13.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	0	
2	Monitorting, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	13.000.000	Monitorting, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	13.000.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	0	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	414.988.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	414.988.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	
6	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	60.000.000	Penyedia Bahn Logistik Kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	60.000.000	
5	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.000.000	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.000.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	54.990.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	54.990.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Penyelenggara Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	234.998.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Penyelenggara Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	234.998.000	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	99.947.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	99.947.000	
9	Pengadaan Mebel	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Digunakan	30 unit	0	Pengadaan Mebel	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Digunakan	30 unit	0	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	99.947.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	99.947.000	
11	Penyedia Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota			457.400.000	Penyedia Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota			457.400.000	
12	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyedia Surat Menyurat	1 Laporan	0	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyedia Surat Menyurat	1 Laporan	0	
13	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	80.000.000	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	80.000.000	
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	377.400.000	-	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	377.400.000	
			-	-	276.236.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	276.236.000	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	17 unit	179.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	17 unit	179.300.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50.000.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan yang lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46.936.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan yang lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46.936.000	
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
19	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	17.499.900	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	17.499.900	
20	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	17.499.900	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota		2 dokumen	17.499.900	
21	Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0	Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	0	
23	Adminitrasi Keunagan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota		-	3.452.073.657	Adminitrasi Keunagan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	3.452.073.657	
24	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	3.438.068.357	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	3.438.068.357	
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhirtahun SKPD	1 laporan	14.005.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhirtahun SKPD	1 laporan	14.005.300	
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	0	
II	Program : PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Program : PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
1.2	Kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	0	
III	Program : PERNCANAAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	225.000.000	Program : PERNCANAAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	225.000.000	
1.3	Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	225.000.000	Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	225.000.000	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Perancari Kerja berdasarkan Klastr Kopetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kopetensi Pada Tahun N	120 unit	225.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Perancari Kerja berdasarkan Klastr Kopetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kopetensi Pada Tahun N	120 unit	225.000.000	
IV	Program : PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	129.446.647	Program : PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	129.446.647	
1.4	Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	129.446.647	Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	129.446.647	

NO	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Antar Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 orang	129.446.647	Pelayanan Antar Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 orang	129.446.647	
IV	Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
1.4	Program : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Program : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
1	Pengembangan Pelaksanaan Jasmani Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	1000 orang	0	Pengembangan Pelaksanaan Jasmani Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	1000 orang	0	
V	Program : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA IINDUSTRIAL	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	1.148.449.800	Program : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA IINDUSTRIAL	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	1.148.449.800	
1.5	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	1.148.449.800	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	1.148.449.800	
1	Koordinasi, Singkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	890.030.000	Koordinasi, Singkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	890.030.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Srana dan Prasarana Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	0	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Srana dan Prasarana Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	0	
3	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelasanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelasanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	225.000.000	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelasanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelasanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	225.000.000	
4	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	33.419.800	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	33.419.800	
VI	Program : PENGELOLA SITEM INFORMASI NASIONAL	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	559.590.000	Program : PENGELOLA SITEM INFORMASI NASIONAL	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	559.590.000	
1.6	Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanagn Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	559.590.000	Kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanagn Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	559.590.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sidtem Informasi Nasional (SIINas)	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Kawasan Industri, Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sidtem Informasi Nasional (SIINas)	1 dokumen	159.590.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sidtem Informasi Nasional (SIINas)	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Kawasan Industri, Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sidtem Informasi Nasional (SIINas)	1 dokumen	159.590.000	
2	Diseminasi, Publikasi, Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIInas	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi, Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIInas	1 dokumen	400.000.000	Diseminasi, Publikasi, Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIInas	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi, Publikasi, Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIInas	1 dokumen	400.000.000	
VII	Program: PERENCAAN KAWASAN TRASMIGRASI	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Program: PERENCAAN KAWASAN TRASMIGRASI	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	
1.7	Kegiatan: Pencadagn Tanah Untuk Kawasan Trasmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	Kegiatan: Pencadagn Tanh Untuk Kawasan Trasmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi yang Bisa Dibangun yang Dikerja Samakan Dengan Daerah Lain	1 dokumen	0	Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi yang Bisa Dibangun yang Dikerja Samakan Dengan Daerah Lain	1 dokumen	0	
VIII	Program: PENEGBANGAN KAWASAN TRASMIGRASI	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	61.492.500	Program: PENEGBANGAN KAWASAN TRASMIGRASI	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	61.492.500	
1.8	Kegiatan: Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	61.492.500	Kegiatan: Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Kab.Lima Puluh Kota	-	-	61.492.500	
1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kepala Keluarga Trasmigrasi yang Dibina	40 kepala keluarga	61.492.500	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kepala Keluarga Trasmigrasi yang Dibina	40 kepala keluarga	61.492.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD 2026, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang nagari dan kecamatan tahun 2026, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah diarahkan secara khusus untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Usulan telah dilakukan secara aplikasi *SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah)*, tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun 2026. Sebelumnya OPD telah menetapkan kamus usulan *e-musrenbang 2026*, termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Berdasarkan kamus usulan tersebut, nagari dan kecamatan mengusulkan kegiatan ke OPD terkait untuk selanjutnya dilakukan verifikasi layak atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam Renja 2026.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Setelah dilakukan verifikasi layak atau tidak layak terhadap usulan dari masyarakat, maka tidak semua usulan tertampung dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam bentuk program / kegiatan pembangunan Tahun 2026. Adapun kriteria layak atau tidak layak usulan masyarakat tersebut bisa ditampung dalam Rencana Kerja OPD antara lain :

1. Usulan tersebut harus mendukung program unggulan pembangunan daerah untuk tahun 2026;
2. Usulan tersebut harus mendukung IKU Pemda dan IKU OPD;
3. Adanya azas pemerataan wilayah dan anggaran, dimana nagari-nagari yang banyak mengusulkan program/kegiatan akan berbagi kepesertaannya dengan nagari-nagari lain yang sama mengusulkan; dan

4. Apabila usulan dalam bentuk bantuan/hibah peralatan, maka harus memenuhi Peraturan tentang hibah (Perbup) dan Keputusan Kepala OPD.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang berasal dari usulan masyarakat (Musrenbang) yang telah tertampung dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.6 (Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut :

Tabel 2.5
Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	20-03-2025	Prima Maifirson, S.Pd., M.M	Pelatihan kewirausahaan mandiri	Pelatihan kewirausahaan mandiri	KECAMATAN MUNGKA , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	180000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
2	20-03-2025	Beni Murdani, SE	Pelatihan kewirausahaan mandiri	Meningkatnya angka pencari kerja dan potensi pengangguran	Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	210000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
3	21-03-2025	Zulhikmi, M.M.Pd. Dt Rajo Suaro	Pelatihan kewirausahaan mandiri	Kurangnya keterampilan berwirausaha bagi pencari kerja	Akabiluru , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	300000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
4	21-03-2025	Hendri,S.Ag	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Pelatihan Teknik Las Listrik bagi pencari kerja	Nagari Koto Baru Simalanggang , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	420000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
5	21-03-2025	Ajisman Dt. Majo Kayo.SH	Pelatihan kewirausahaan mandiri	Pelatihan Usaha Mandiri	Nagari Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	600000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
6	21-03-2025	Defrianto ifkar	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Pengadaan Pelatihan las listrik bagi pencari kerja di kecamatan harau	Kecamatan harau, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	420000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
7	22-03-2025	Safrinal	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	UNTUK MENJADIKA PEMDA DAN MASYARKAT LEBIH PRODUKTIF DAN UNTUK PARA PENCARI KERJA DAN MEMBUKA USAHA MANDIRI	NAGARIGUGUAK VIII KOTO, KECAMATAN GUGUAK , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	280000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
8	23-03-2025	Marsanova Andesra, SH. MH	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	UNTUK PEMUDA PENCARI KERJA ATAU YANG INGIN WIRASWASTA	KENAGARIAN KOTO TUO DAN NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	280000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
9	23-03-2025	Marsanova Andesra, SH. MH	Pelatihan Produk Furniture	UNTUK PELATIHAN PEMUDA YANG INGIN MEMBUKA WIRUSAHA DAN MENCARI KERJA	KENAGARIAN KOTO TUO DAN NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	260000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
10	23-03-2025	Marsanova Andesra, SH. MH	Pelatihan kewirausahaan mandiri	UNTUK PEMUDA DAN IBU IBU PRODUKTIF YANG INGIN BERWIRA USAHA	NAGARI SIMALANGGANG DAN KOTO TANGAH SIMALANGGANG KEC. PAYAKUMBUH, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	60000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
11	23-03-2025	Ubeta Syandra	Pelatihan kewirausahaan mandiri	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri	Nagari Situjuah Gadang , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	120000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
12	23-03-2025	Ubeta Syandra	Pelatihan kewirausahaan mandiri	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri	Nagari Situjuah Banda Dalam , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	120000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
13	24-03-2025	TAUFIK HIDAYATUL LAH IHSAN	Pelatihan kewirausahaan mandiri	Perlunya Bagi Pencari Kerja	Kecamatan guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	30000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
14	24-03-2025	TAUFIK HIDAYATUL LAH IHSAN	Pelatihan Produk Furniture	Perlunya Bagi Pencari Kerja	Kecamatan Guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	130000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
15	24-03-2025	TAUFIK HIDAYATUL LAH IHSAN	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Perlunya Bagi Pencari Kerja	Kecamatan Guguak, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	140000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
16	24-03-2025	Syafril	Pelatihan kewirausahaan mandiri	kurangnya minat wirausaha di tengah masyarakat	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	90000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
17	24-03-2025	Pen Yul Hasni	Pelatihan kewirausahaan mandiri	PERLUNYA BAGI PENCARI KERJA	KEC. BUKIK BARISAN, SULIKI, GUNUANG OMEH , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	30000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja
18	24-03-2025	Pen Yul Hasni	Pelatihan Produk Furniture	PERLUNYA BAGI PENCARI KERJA	KEC. BUKIK BARISAN, SULIKI, GUNUANG OMEH , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	130000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
19	24-03-2025	Pen Yul Hasni	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	PERLUNYA BAGI PENCARI KERJA	KEC. BUKIK BARISAN, SULIKI, GUNUANG OMEH , Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	140000000	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
20	27-03-2025	Doni Ikhlas, S.H	Pelatihan kewirausahaan mandiri	Pelatihan Kewirausahaan mandiri bagi masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Verifikasi TAPD	30000000	-	Perluasan Kesempatan Kerja

Beberapa program/kegiatan/subkegiatan dari usulan pokir dan musrembang nagari yang tertampung dalam Renja 2026 yaitu terdapat 20 kegiatan yang terfokus pada kegiatan pelatihan untuk pencari kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dimana di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden Periode 2025-2029, yaitu “ *Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas*”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan Prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak azasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk pencapaian sarasannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur. RPJMN membidik tiga sasaran utama yaitu :

1. Penurunan tingkat kemiskinan,
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Selain itu telah pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 ditetapkan juga indikator sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan 4,5% - 5,0%.
2. Indeks modal manusia (IMM) 0,59%
3. Pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-1.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan pada misi tiga serta misi ke empat RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Andal, Sehat, Produktif dan Kompetitif serta Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata yang Tangguh dan Berkeadilan*, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja tahun 2025-2029 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan peranan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan sektor IKM dan Kewirausahaan lokal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi; Pembangunan di sektor IKM dan Kewirausahaan ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor IKM dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor Industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja, dengan indikator :

- Tingkat produktifitas tenaga kerja

2. Meningkatkan daya saing industri

- Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah : Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

3. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi

- Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah : Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan

4. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya nilai SAKIP, dengan indikator :
 - Hasil reuiu Inspektorat

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah dicapai mengingat tujuan dan sasaran strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Sementara itu, untuk tujuan dan sasaran utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan target Jangka Menengah yang telah disepakati dapat dilihat pada Rumusan tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1

**Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029**

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ASASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ASASARAN PADA TAHUN KE-						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penguatan IKM dan Kewirausahaan Lokal		1. Proporsi Jumlah IKM	3.43%	3.51%	3.59%	3.67%	3.75%	3.82%	
			2. Rasio Kewirausahaan	6,92	7,23	7,36	7,50	7,64	7,77	
			3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	62.55%	62.89%	63.23%	63.57%	63.91%	64.25%	
			4. Rasio PDRB Industri Pengelohan	6,63	7,01	7,39	7,77	8.15	8.53	

			5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,73	3,65	3,57	3,49	3,41	3,34	
			6. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	38,64	39,84	41,04	42,24	43,44	48,65	
		1. Meningkatnya kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp61.369.049	Rp62.871.993	Rp64.374.937	Rp65.877.881	Rp67.380.825	Rp68.883.769	
		2. Meningkatnya Daya saing Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,63	7,01	7,39	7,77	8,15	8,53	
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	71,12	73,5	74	75	76	77	

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya pada bab 2, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal

1. Sasaran :

1. Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja
2. Meningkatnya daya saing industri
3. Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
4. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

3.3. Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja tahun 2026 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra tahun 2021-2026. Selain itu, yang tak kalah penting program dan kegiatan tahun 2026 harus mengacu kepada *pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program unggulan Kepala Daerah, SDGs, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.*

Penelaahan faktor faktor yang menghambat ataupun mendorong kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dihasilkan urusan prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah
2. Urusan Tenaga Kerja
3. Urusan Industri
4. Urusan Transmigrasi

Terkait dengan diatas, maka program dan kegiatan dikelompokkan menjadi program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan

Transmigrasi. Ringkasan Program dan Kegiatan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 4. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD 6. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
3	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 3. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 4. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 5. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5. Fasilitasi kunjungan tamu 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 2. Pengadaan mebel 3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Penyediaan jasa surat menyurat
6	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Tabel 3.3
Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi 2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 3. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil
3	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
4	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja 2. Pelayanan antar kerja 3. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja 4. Perluasan kesempatan kerja
5	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Job fair/ bursa kerja
6	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan RPTKA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Koordinasi pengawasan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota
7	Program : Hubungan Industrial Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan 2. Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan 3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
8	Program : Hubungan Industrial Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota 3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi 4. Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota 5. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tabel 3.4
Urusan Pilihan Perindustrian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri 3. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri 4. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 5. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri
2	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
3	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2. Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

Tabel 3.5
Urusan Pilihan Transmigrasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman 2. Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

Berdasarkan empat pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 8 program dengan 19 kegiatan dan 65 subkegiatan. Namun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sesuai anggaran 7 program dengan 13 kegiatan dan 28 subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Fasilitasi kunjungan tamu 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
3.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan mebel 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

4.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya 3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor
5.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
6.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran

Tabel 3.7
Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota
2.	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
3.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan antar kerja

Tabel 3.8
Urusan Pilihan Perindustrian

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 3. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencanan pembangunan industri
2.	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan : Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

Tabel 3.9
Urusan Pilihan Transmigrasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut rencana kerja dan pendanaan anggaran program dan kegiatan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 secara lengkap kami uraikan pada bab 4.

Tabel 3.10
T-B.36 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program
Prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2024)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Melampaui	-	Adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja meningkatkan kualitas IKM ... Kota melalui pembinaan dan pengawasan IKM
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Sudah Tercapai	Mediasi Dinas sudah baik namun belum optimal	
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Sudah Tercapai	Mediasi Dinas sudah baik namun belum optimal	
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Belum Tercapai	Masih kurangnya kerjasama Pemkab 50 Kota dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk penempatan tenaga kerja asal Kab. 50 Kota	
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek			
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			
9	Angka partisipasi angkatan kerja			
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja			
11	Tingkat pengangguran terbuka			
12	Rasio penduduk yang bekerja			
13	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas			
14	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja			

Berdasarkan tabel diatas cakupan bina kelompok pengrajin telah melampaui target hal ini dikarenakan adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja meningkatkan kualitas IKM di Lima Puluh Kota melalui pembinaan dan pengawasan IKM. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun melebihi target dimana target yang ditetapkan

adalah 10 kasus sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat kasus, pada tahun 2023 terdapat dua kasus dan di tahun 2024 didapatkan 3 kasus sengketa namun kedepannya diharapkan angka sengketa semakin berkurang. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2022 0 kasus, di tahun 2023 telah diselesaikan sengketa melalui jalur mediasi sebanyak 2 dan tahun 2024 juga dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebanyak 2 kasus, namun masih diperlukan mediasi secara optimal dari dinas. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, angka partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, rasio penduduk yang bekerja, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja belum mencapai target hal ini dikarenakan masih kurangnya kerjasama Pemkab Lima Puluh Kota dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk penempatan tenaga kerja asal Kab. Lima Puluh Kota.

Oleh karena itu, pada Renja 2026 penganggaran program dan kegiatan benar-benar difokuskan untuk mencapai ketertinggalan dalam pencapaian indikator kinerja. Kesempatan mencapai ketertinggalan indikator kinerja pada tahun 2026 ini. Berikut ini adalah Rumusan Program Kegiatan beserta pagu anggaran dan prakiraan maju tahun 2027.

Tabel 3.11

**Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026**

Kode					URUSAN/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	6.871.861.095	APBD	-	-	8.194.090.357
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	2.510.512.600	APBD	-	-	1.397.600.000
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	2.510.512.600	APBD	-	-	1.397.600.000
2	07	0 2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	40.000.000	APBD	-	-	0
2	07	0 2	2.0 1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	40.000.000	APBD	-	1 Dokumen	0
2	07	0 3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	2.460.512.600	APBD	-	-	724.100.000
2	07	0 3	2.0 1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	90 Orang	2.460.512.600	APBD	-	90 Orang	649.100.000
2	07	0 3	2.0 4		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	5 Perusahaan	0	APBD	-	5 Perusahaan	50.000.000
2	07	0 3	2.0 5		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	0	APBD	-	-	25.000.000
2	07	0 4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	10.000.000	APBD	-	-	570.000.000
2	07	0 4	2.0 1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	675 orang	10.000.000	APBD	-	675 orang	270.000.000
2	07	0 4	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar	-	Kabupaten	100 orang	0	APBD	-	100 orang	300.000.000

		4	3		Kerja		Lima Puluh Kota						
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	0	APBD	-	-	103.500.000
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	11 Perusahaan, 1 Laporan	0	APBD	-	11 Perusahaan, 1 Laporan	38.500.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	18 Sengketa, 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja, 1 Lembaga, 100 orang	0	APBD	-	18 Sengketa, 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja, 1 Lembaga, 100 orang	65.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	4.361.348.495	APBD	-	5 Dokumen,	6.796.490.357
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	3.361.347.495	APBD	-	-	6.686.490.357
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	3.241.347.395	APBD	-	-	4.898.090.357
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	5 Dokumen, 10Laporan	15.455.900	APBD	-	5 Dokumen,10 Laporan	111.956.000
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	85 orang/Bulan, 3 dokumen, 9 laporan	2.940.674.895	APBD	-	85 orang/Bulan, 3 dokumen, 9 laporan	3.555.448.357
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Unit, 60 Paket, 2 Dokumen,5 orang, 60 orang	12.581.000	APBD	-	Dokumen,5 orang, 60 orang	155.500.000
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Paket, 8 dokumen, 2 Laporan	99.503.800	APBD	-	3 Paket, 8 dokumen, 2 Laporan	270.000.000
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	8 unit, 40 unit, 5 unit, 1 unit	29.924.000	APBD	-	8 unit, 40 unit, 5 unit, 1 unit	350.000.000
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Laporan	90.500.000	APBD	-	3 Laporan	228.250.000
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	18 unit, 20 Unit, 2 Unit	52.707.800	APBD	-	18 unit, 20 Unit, 2 Unit	226.936.000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	70.000.100	APBD	-	-	1.379.890.000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 Dokumen	70.000.100	APBD	-	4 Dokumen	1.379.890.000

3	31	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	50.000.000	APBD	-	-	408.510.000
3	31	0 4	2.0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	2 Dokumen	50.000.000	APBD	-	2 Dokumen	408.510.000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.000.001.000	APBD	-	-	110.000.000
3	32	0 4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1.000.001.000	APBD	-	-	110.000.000
3	32	0 4	2.0 1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	10 Kepala Keluarga, 1 Satuan Permukiman	1.000.001.000	APBD	-	10 Kepala Keluarga, 1 Satuan Permukiman	110.000.000
					TOTAL								8.194.090.357

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Berdasarkan rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 pada Bab 3, berikut ini adalah tabel rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2026.

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2026 dan 2027

No	Bidang Urusan	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2026		Tahun 2027
		Program			Kegiatan		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	3.241.347.395	4.898.090.357	7	3.241.347.395	4.898.090.357
2	Urusan Tenaga Kerja	3	2.510.512.600	1.397.600.000	3	2.510.512.600	1.397.600.000
3	Urusan Industri	3	120.000.100	1.788.400.000	2	120.000.100	1.788.400.000
4	Urusan Transmigrasi	1	1.000.001.000	110.000.000	1	1.000.001.000	110.000.000
	Total	8	6.871.861.095	8.194.090.357	13	6.871.861.095	8.194.090.357

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2026 dan 2027

Kode	URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									8.194.090.357		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.510.512.600			1.397.600.000		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2.510.512.600			1.397.600.000		
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						40.000.000			0		
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						40.000.000			0		
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro											
					Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase tersedianya rencana tenaga kerja (RTK)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Dokumen	0 %	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						2.460.512.600			724.100.000		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						2.460.512.600			649.100.000		
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi											
					Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	90 Orang	100 %	2.460.512.600	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	90 Orang	300.000.000
2	07	03	2.01	0002	Koordniasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja											

						Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Lembaga	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	75.000.000					
2	0	0	2.0	000		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																	
						Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	274.100.000					
2	0	0	2.0			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil													0				50.000.000
2	0	0	2.0	000		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																	
						Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Persentase peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	5 Perusahaan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	50.000.000					
Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target																			
2	0	0	2.0			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													0				25.000.000
2	0	0	2.0	000		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
						Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga	1 Dokumen	25.000.000					

2	0	0	2.0	000	Job Fair/Bursa Kerja													
	7	4	3	3		Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.09 %	100 Orang	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	300.000.000
Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN				Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target														
2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							0					103.500.000	
2	0	0	2.0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0						38.500.000
2	0	0	2.0	000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan													
	7	5	1	1		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaandi Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Persentase peningkatan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di KAb 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Perusahaan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	6 Perusahaan	11.500.000
2	0	0	2.0	000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan													
	7	5	1	2		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Persentase peningkatan perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Perusahaan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	12.000.000

					Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaandi Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Persentase menurunnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Perkara	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	9 Perkara	12.000.000
2	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi												
	7	5	2	3	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaandi Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Persentase menurunnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.000.000
2	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota												
	7	5	2	4	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaandi Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Persentase menurunnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Lembaga	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	12.000.000
2	0	0	2.0	000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja												
	7	5	2	5	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaandi Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase menurunnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	20.000.000

Kode	URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3										4.361.348.495				6.796.490.357		
3										3.361.347.495				6.686.490.357		
3		01								3.241.347.395				4.898.090.357		
3		01	2.01							15.455.900				111.956.000		
3		01	2.01	0001												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	17.500.000
3		01	2.01	0002												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000
3		01	2.01	0003												
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000

						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35 Orang/bulan	100 %	2.930.674.895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.508.448.357				
3	31	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.000.000				
3	31	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000				
3	31	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.500.000				
3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	12.000.000				
3	31	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.500.000		
3	31	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								12.581.000						155.500.000
Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target																
3	31	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai															
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	15.000.000			
3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	36.000.000			
3	31	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000			
3	31	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	2.529.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	12.000.000			

3	3	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
	1	1	5	9		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Orang	100 %	10.052.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	60.000.000		
3	3	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
	1	1	5	0																
Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Orang	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	17.500.000			
3	3	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah										99.503.800				270.000.000	
	1	1	6																	
3	3	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	1	1	6	1		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	5.001.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000		
3	3	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	1	1	6	4		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	25.000.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000		
3	3	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
	1	1	6	5																

						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	6.000.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.000.000					
3	3	0	2.0	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.000.000					
Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target				
3	3	0	2.0	000		Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000					
3	3	0	2.0	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	60.002.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000					
3	3	0	2.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													29.924.000				350.000.000
3	3	0	2.0	000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	250.000.000					
3	31	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Unit	100 %	14.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0					
3	31	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000					
3	31	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target																			
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0					
3	31	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													90.500.000				228.250.000
3	31	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.250.000
3	31	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55.000.000
Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target														
3	31	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	160.000.000

3	3	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.707.800					226.936.000	
3	3	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	18 Unit	100 %	32.997.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	150.000.000
3	3	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	100 %	9.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000
3	3	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
					Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	10.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 Unit	46.936.000
Kode					KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
					URUSAN	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target												

3	3	0			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						70.000.100					1.379.890.000	
3	3	0	2.0		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						70.000.100					1.379.890.000	
3	3	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri												
						Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.02 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	325.000.000
3	3	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri												
						Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.02 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	600.000.000
3	3	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat												
						Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.02 %	1 Dokumen	100 %	44.573.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
3	3	0	2.0	000		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
				6		Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.02 %	1 Dokumen	100 %	15.426.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	54.890.000		
3	3	0				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											50.000.000			408.510.000
3	3	0	2.0			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota											50.000.000			408.510.000
3	3	0	2.0	000		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
				1		Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI di Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	58.510.000		
3	3	0	2.0	000		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
				2		Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI di Kab 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	350.000.000		
3	3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											1.000.001.000			110.000.000
3	3	0				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI											1.000.001.000			110.000.000
3	3	0	2.0			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian											1.000.001.000			110.000.000

	2	4	1																
3	3	0	2.0	000	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
	2	4	1	1		Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap Kemandirian	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Persentase pengembangan wilayah transmigrasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	10 Kepala Keluarga	100 %	1.000.001.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	10 Kepala Keluarga	50.000.000	
3	3	0	2.0	000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
	2	4	1	2		Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Persentase pengembangan wilayah transmigrasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	1 Satuan Permukiman	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	60.000.000	
TOTAL												6.871.861.095				8.194.090.357			

BAB V **P E N U T U P**

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2025-2029.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

H. SAFNI